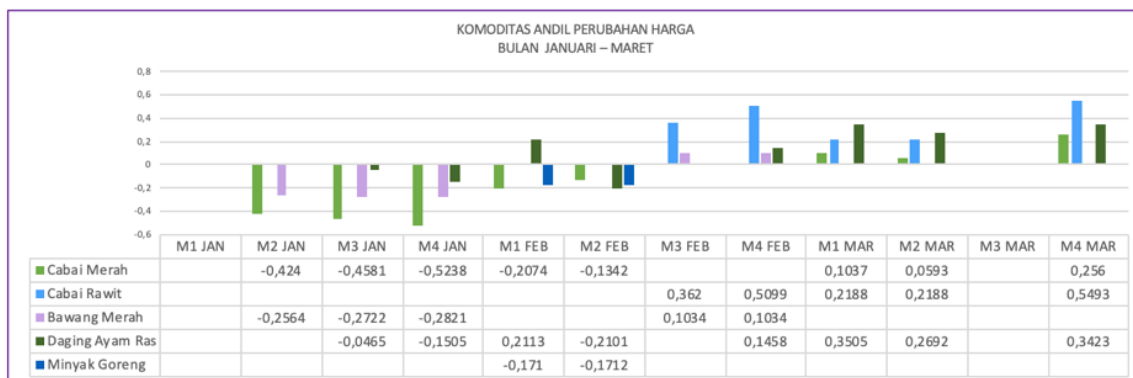
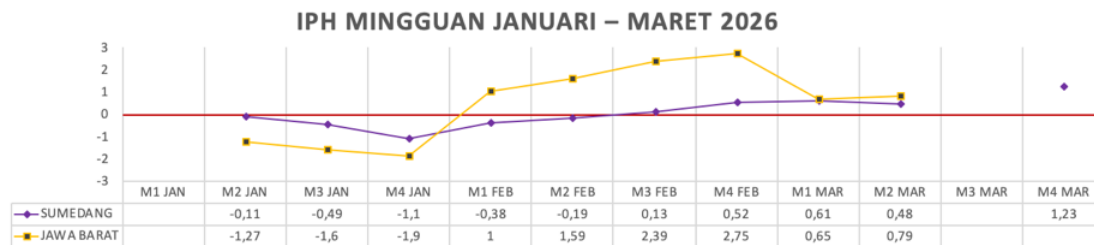


1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Perkembangan inflasi Kabupaten Sumedang pada Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat dalam grafik Indeks Perkembangan Harga sebagai berikut.



Pada Triwulan I Tahun 2026, IPH Kabupaten Sumedang mengalami deflasi pada Januari hingga pertengahan Februari, yaitu -0,11 (M2 Januari), -0,49 (M3 Januari), -1,10 (M4 Januari), dan -0,38 (M1 Februari). Deflasi masih terjadi pada M2 Februari sebesar -0,19, kemudian berbalik menjadi inflasi pada M3 Februari sebesar 0,13 dan meningkat menjadi 0,52 pada M4 Februari. Pada Maret, inflasi masih terjadi namun menurun dibanding minggu sebelumnya, yaitu 0,61 pada M1 Maret, 0,48 pada M2 Maret, serta meningkat tajam menjadi 1,23 pada M4 Maret. Perubahan IPH tersebut terutama dipengaruhi oleh komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah, dan daging ayam ras.

Sementara itu, perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting periode Januari s.d Maret 2026 dapat dilihat pada uraian sebagai berikut.

- **Beras Premium**, tercatat stabil tinggi sejak Januari hingga pertengahan Maret pada kisaran Rp15.300/kg, dan meningkat menjadi Rp15.400/kg hingga akhir Maret (p2% - 3% HET Rp14.900/kg).
- **Beras Medium**, tercatat stabil tinggi pada Januari sebesar Rp13.600/kg, kemudian meningkat sejak akhir Februari mencapai Rp13.800-Rp14.000/kg pada Maret 2026 (p0,7% - 3,6% HET Rp13.500/kg).
- **Daging Ayam Ras**, tercatat stabil di bawah HAP hingga awal Februari pada kisaran Rp38.000 - Rp39.000/kg. selanjutnya meningkat pada pertengahan Februari menjadi Rp41.000/kg dan mencapai puncak Rp51.000/kg pada Maret, sebelum turun kembali menjadi Rp43.000/kg (p2,5% - 27,5% HAP sebesar Rp40.000/kg).
- **Telur Ayam Ras**, tercatat stabil pada Januari sebesar Rp28.000-Rp31.000/kg, kemudian meningkat pada pertengahan Februari hingga akhir Maret menjadi Rp31.000 - Rp32.000/kg (p7% HAP sebesar Rp30.000).

Daging Sapi, tercatat stabil tinggi pada Januari sebesar Rp133.000/kg, kemudian meningkat menjadi Rp138.000/kg pada pertengahan Februari dan mencapai puncak Rp160.000/kg pada akhir Maret, sebelum turun menjadi Rp145.000/kg (p6% - 23% HAP Rp130.000).

- **Bawang Merah**, tercatat berada di bawah batas bawah HAP pada Januari hingga akhir Februari dengan harga Rp30.000-Rp34.000/kg, kemudian meningkat kembali ke dalam rentang HAP pada Maret sebesar Rp39.000-Rp40.000/kg (HAP Rp36.500 - Rp41.500).
- **Bawang Putih**, tercatat stabil di bawah HAP pada kisaran Rp36.000/kg. kemudian meningkat pada pertengahan Maret menjadi Rp38.000 - Rp40.000/kg (p5% HAP sebesar Rp40.000/kg).
- **Cabai Merah Keriting**, tercatat stabil dalam rentang HAP sebesar Rp37.000 - Rp52.000/kg (HAP Rp37.000 - Rp55.000/kg).
- **Cabai Merah Biasa**, tercatat tinggi di atas HAP pada awal Januari sebesar Rp56.000/kg, kemudian menurun ke dalam rentang HAP sebesar Rp44.000 - Rp50.000/kg. Namun kembali meningkat sejak akhir Februari menjadi Rp60.000 dan mencapai Rp65.000/kg pada akhir Maret (p9% - 18% batas atas HAP Rp55.000).
- **Cabai Rawit Merah**, tercatat tinggi pada Januari sebesar Rp70.000/kg, kemudian menurun ke Rp49.000/kg. Selanjutnya, meningkat signifikan sejak awal Februari hingga akhir Maret pada kisaran Rp70.000 - Rp100.000/kg (p75% batas atas HAP Rp57.000).
- **Cabai Rawit Hijau**, terpantau fluktuatif pada kisaran Rp46.000 - Rp70.000/kg, dengan kecenderungan meningkat pada akhir Februari.
- **Minyak Goreng Kemasan**, meningkat sejak akhir Februari dari 500/kg menjadi Rp19.000 - Rp20.000/kg
- **Minyak Goreng Curah**, meningkat bertahap dari Rp18.000/kg menjadi Rp21000 sejak awal Maret.
- **Gula Pasir**, meningkat bertahap dari R17.500/kg menjadi Rp18.200/kg sejak Februari hingga Maret.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa komoditas yang mengalami kenaikan signifikan antara lain cabai rawit merah, cabai merah biasa, telur ayam ras, daging ayam ras, dan daging sapi yang sempat melonjak jauh di atas HAP, sementara komoditas yang mengalami kenaikan namun tidak terlalu tinggi meliputi beras premium dan medium, bawang putih, bawang merah, minyak goreng (kemasan dan curah), serta gula pasir. Adapun komoditas yang relatif stabil berada dalam rentang harga normal yaitu cabai merah keriting.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Sebagaimana telah dijelaskan pada poin 1, bahwa di Kabupaten Sumedang terjadi kenaikan harga pada beberapa komoditas pangan utama. Hal ini disebabkan oleh:

1. Meningkatnya permintaan masyarakat, khususnya menjelang dan selama HBKN Ramadhan dan Idul Fitri
2. Meningkatnya harga di tingkat distributor dan pasar induk yang berdampak pada kenaikan harga di Kabupaten Sumedang.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

- a. **Pelaksanaan sidak ke Pasar Inpres Sumedang** menjelang HBKN Ramadhan 1447 H oleh Tim Satgas Saber Pangan Polres Sumedang didampingi jajaran Pemerintah Daerah

Kabupaten Sumedang, pada tanggal 10 Februari 2026, dalam rangka pemantauan ketersediaan pasokan dan stabilitas harga pangan.

- b. **Pemantauan harga** secara harian baik yang dilakukan oleh UPTD Pasar maupun OPD terkait lainnya yang turun langsung ke setiap pasar dan distributor. Pemantauan harga juga dilakukan melalui aplikasi SINDANG (Sistem Informasi Niaga Kabupaten Sumedang) yang menyediakan data harga dan pasokan secara realtime serta mampu mendeteksi potensi inflasi yang akan terjadi menggunakan metode SMA (*Simple Moving Average*). [Dashboard | sindang \(sumedangkab.go.id\)](https://dashboard.sindang.sumedangkab.go.id)
- c. **Pemberian subsidi harga pangan** pada kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) dalam rangka HBKN Ramadhan 1447 H yang dilaksanakan pada tanggal 14, 16, dan 17 Maret 2026, dengan total nilai Rp15.500.000 untuk komoditas minyak goreng dan telur yang didukung oleh Bank Sumedang.
- d. **Pelaksanaan 10 kali Gerakan Pangan Murah**, yang dilaksanakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang, bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat, BULOG dan distributor di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- e. **Pelaksanaan 10 kali Operasi Pasar Murah**, yang dilaksanakan Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan, dan Perindustrian Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat, BULOG dan distributor di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- f. **Gerakan penanaman jagung** yang digagas oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan bersama Forkopimda di seluruh kecamatan sebagai upaya penguatan ketahanan pangan daerah.
- g. **Gerakan penanaman padi** dengan sistem Tabela (Tanam Benih Langsung) oleh Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kecamatan beserta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang.
- h. **Optimalisasi Gerakan Teras Hejo** di pekarangan dengan memberdayakan Kelompok Wanita Tani di wilayah Kabupaten Sumedang.
- i. **Penanggulangan hama dan penyakit tanaman** pada komoditas padi dan jagung secara rutin oleh jajaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Sumedang bekerja sama dengan UPTD BPTPH Provinsi Jawa Barat, Forkopimcam, Kelompok Tani, serta Pemerintah Desa.
- j. **Pembangunan jaringan irigasi tersier dan perbaikan infrastruktur irigasi** untuk mendukung produktivitas pertanian di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Sumedang.
- k. **Persiapan pembangunan jalan usaha tani** guna meningkatkan aksesibilitas distribusi hasil pertanian di Kecamatan Conggeang.
- l. **Penguatan bantuan pertanian** berupa pemberian alat mesin pertanian (rotavator dan tractor roda 4) kepada para kelompok tani di wilayah Kabupaten Sumedang.
- m. **Sosialisasi dan penyuluhan** kepada masyarakat terkait pengenalan budidaya jagung serta pengendalian hama dan penyakit tanaman padi.
- n. **Penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD)** kepada 36 desa rentan pangan, dengan sasaran 100 keluarga penerima manfaat di masing-masing desa. Selain itu, disalurkan pula bantuan beras sebanyak 3.270 kg kepada 327 penerima manfaat yang terdampak bencana alam.
- o. **Pelaksanaan edukasi belanja bijak** kepada masyarakat menjelang HBKN Idul Fitri 1447 H guna mengendalikan perilaku *panic buying*.
- p. **Pelaksanaan dua kali High Level Meeting TPID** menjelang Ramadhan dan Idul Fitri dipimpin langsung Bupati Sumedang dan dihadiri Wakil Bupati, unsur Forkopimda, Kepala OPD, serta pihak terkait lainnya.

Pelaksanaan tiga kali Rapat Teknis TPID yang dipimpin Sekretaris Daerah serta

- q. Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam rangka pembahasan kenaikan harga pangan di Kabupaten Sumedang.
- r. **Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah** bersama Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara rutin.

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Hasil evaluasi kebijakan pengendalian inflasi yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sumedang menunjukkan bahwa upaya pengendalian harga dan penguatan ketahanan pangan telah dilakukan secara terkoordinasi melalui berbagai instrumen kebijakan, sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan pemantauan dan pengawasan harga pangan melalui sidak pasar serta pemantauan harian oleh UPTD Pasar dan OPD terkait, yang didukung pemanfaatan Aplikasi SINDANG, memberikan dukungan data harga dan pasokan secara realtime serta informasi awal terkait potensi pergerakan harga.
- b. Pelaksanaan intervensi pasar melalui Gerakan Pangan Murah (GPM), Operasi Pasar Murah, serta pemberian subsidi harga pangan pada periode HBKN berkontribusi dalam menjaga keterjangkauan harga dan daya beli masyarakat, khususnya pada komoditas pangan strategis.
- c. Pelaksanaan penguatan sisi produksi melalui gerakan penanaman jagung, penerapan sistem tanam padi Tabela, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman secara rutin, mendukung keberlanjutan produksi dan ketersediaan pasokan pangan daerah.
- d. Pelaksanaan penguatan infrastruktur dan sarana prasarana pertanian, meliputi pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi, persiapan jalan usaha tani, serta bantuan alat mesin pertanian, berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi hasil pertanian.
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui Gerakan Teras Hejo serta sosialisasi dan penyuluhan pertanian, mendukung peningkatan kapasitas masyarakat dan ketahanan pangan rumah tangga.
- f. Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada desa rentan pangan dan masyarakat terdampak bencana berperan dalam menjaga aksesibilitas pangan bagi kelompok rentan serta mengurangi tekanan harga di wilayah tertentu.
- g. Pelaksanaan edukasi kepada masyarakat terkait belanja bijak menjelang HBKN berkontribusi dalam mengendalikan perilaku konsumsi yang berpotensi memicu kenaikan harga.
- h. Pelaksanaan High Level Meeting (HLM) dan Rapat Teknis TPID secara berkala menjadi forum koordinasi dalam perumusan dan pengendalian kebijakan inflasi daerah.
- i. Keikutsertaan dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Pemerintah Pusat dan Provinsi memperkuat sinergi kebijakan serta konsistensi langkah pengendalian inflasi antara pusat dan daerah.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Dari berbagai kebijakan yang sudah dilaksanakan, Pemerintah Kabupaten Sumedang melalui TPID harus senantiasa:

- a. **Memperkuat sistem pemantauan harga dan pasokan secara harian** dengan melibatkan seluruh UPTD Pasar, OPD terkait, serta memaksimalkan pemanfaatan aplikasi SINDANG untuk mendukung pemantauan harga dan stok kebutuhan pokok

secara realtime dan akurat;

- b. Memperkuat pelaksanaan intervensi pasar seperti Gerakan Pangan Murah (GPM) dan Operasi Pasar dengan penentuan waktu, lokasi, dan komoditas yang lebih berbasis data, terutama pada komoditas yang mengalami kenaikan signifikan menjelang HBKN;
- c. Memperkuat produksi pangan lokal, khususnya aneka cabai agar pasokan tetap terjaga;
- d. Mengintensifkan Kerja Sama Antar Daerah, guna menjamin ketersediaan pasokan bahan pokok di Sumedang, sekaligus menekan fluktuasi harga akibat keterbatasan distribusi;
- e. **Meningkatkan sinergi lintas sektor** bersama TNI, POLRI, dan lintas OPD dalam berbagai program ketahanan pangan;
- f. **Mengintensifkan koordinasi TPID secara rutin melalui *High Level Meeting* (HLM)** dan Rakor TPID;
- g. Meningkatkan belanja daerah yang memiliki *multiplier effect* terhadap peningkatan ekonomi masyarakat.